

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang menyangkut seluruh sudut pandang kehidupan seperti dari sudut politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan yang berskala nasional, merupakan perencanaan yang direncanakan oleh suatu Negara. Prinsip dasar dari pembangunan yang direncanakan adalah untuk pembangunan manusia sebagaimana adanya. Melihat dari sudut pandang perencanaan untuk membangun suatu Negara, maka harus selaras dengan kemajuan masyarakat. Dilihat dari kemajuan lahiriah, batiniah, dan seluruh aspek keadilan sosial.

Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, ternyata memiliki pengaruh yang besar dalam merencanakan pembangunan. Jumlah penduduk yang tinggal dikota-kota besar semakin padat dan semakin membutuhkan banyak lahan untuk dijadikan tempat tinggal. Ketersediaan lahan yang kurang untuk dijadikan pemukiman membuat adanya pilihan lain dengan membangun perumahan menjulang keatas atau bertingkat, seperti apartemen atau rumah susun. Pembangunan rumah susun membutuhkan tanah jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan pembangunan rumah secara konvensional, sehingga ketersediaan lahan terbuka lebih luas di wilayah kota yang dapat digunakan untuk menata kembali daerah-daerah kumuh.

Keinginan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menata wilayahnya dilakukan secara terus menerus dengan tujuan terciptanya suatu kota dengan tata ruang yang

rapi dan terlihat indah. Penertiban setiap wilayah Kota Yogyakarta selalu diperhatikan agar terciptanya suatu keindahan. Mulai dari penataan wilayah pemukiman, perekonomian, industri, wisata, pendidikan dan perkantoran. Penertiban yang dilakukan pemerintah kota Yogyakarta dilakukan untuk menata daerah pemukiman. Namun sayangnya, banyak kasus pemukiman masyarakat yang digusur untuk dijadikan sentra perekonomian yang hanya dikuasai para pemilik modal. Pembangunan rumah susun dan apartemen berkaitan erat dengan strategi pembangunan wilayah, langkanya lahan kosong, dan mahal nya harga tanah, terutama di daerah perkotaan. Untuk itulah pemerintah memandang perlu mengambil langkah-langkah bijaksana dengan melakukan pembangunan rumah susun.

Di beberapa Kota besar yang ada di Indonesia sudah mulai kewalahan dalam mengurus masalah pembangunan hotel dan apartemen yang semakin meningkat. Salah satu daerah seperti Yogyakarta, berdasarkan data BPS Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2016, untuk Hotel Bintang dan memiliki setifikat sebanyak 96 hotel. Sedangkan Jumlah Hotel Non Bintang di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 sebanyak 589 Hotel. Secara perlahan jumlah ini akan terus bertambah dan semakin sulit untuk diawasi oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gerakan sosial muncul dari kalangan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan. Sistem politik yang semakin terbuka dan demokratis, membuka peluang yang besar terhadap lahirnya gerakan sosial. Dalam gerakan masyarakat yang terlihat adalah tentang adanya kepentingan yang mendorong untuk terbentuknya jalinan aktifitas individu-individu sehingga

terbentuknya gerakan tersebut. Menurut Smelser (dalam Arbi Sanit, 1985) bahwa terdapat dua gerakan masyarakat dilihat dari orientasinya yaitu gerakan masyarakat yang berorientasi pada norma dan gerakan masyarakat yang berorientasi pada nilai. Kebijakan pemerintah selama ini belum seutuhnya berpihak pada masyarakat.

Berbagai gerakan penolakan menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah dewasa. Kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengontrol kebijakan menjadikan tumbuhnya keinginan masyarakat melakukan aksi perlawanan karena banyak kekeliruan yang sering terjadi. Bukan hanya menolak tanpa tahu arah tapi masyarakat memiliki tujuan yang jauh lebih luas dalam menyikapi masalah kebijakan yang ada. Salah satu gerakan yang sampai saat ini masih terus diperjuangkan oleh masyarakat adalah yang terjadi di Dusun Balirejo, Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Warga Dusun Balirejo, Kelurahan Muja Muju ini menolak keras pembangunan apartemen karena menurut warga pembangunan apartemen akan berdampak buruk bagi warga Dusun Balirejo. Mulai dari dampak lingkungan hingga dampak sosial(www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/05/03/opmd47291-warga-desak-pemkot-yogya-tindak-tegas-pembangunan-apartemen-ilegal).

Munculnya gejolak pertentangan dari warga Dusun Balirejo sejak tahun 2015. Berawal dari salah satu pemodal yang ingin membangun apartemen. Wilayah dusun Balirejo yang berada di pusat perkotaan tentu saja tidak terlepas dari pembangunan apartemen tersebut. Lokasi pembangunan apartemen berada tepat di dekat sungai Gajah wong. Menurut informasi dari salah satu warga, penolakan terhadap pembangunan apartemen tidak terjadi hanya sekali saja. Sudah pernah ada investor

yang akan melakukan pembangunan apartemen ditempat yang sama. Pada awalnya, apartemen dengan nama Majestic Grand Bale akan dibangun. Namun karena pihak investor tersebut tidak mendapatkan izin pembangunan dari warga setempat, pihak pengembang Majestic Grand Bale akhirnya gagal melakukan pembangunan apartemen. Tidak hanya itu, ditempat yang sama pembangunan sudah tiga kali berganti developer. Yang pertama, PT Kreasi Pratama Satu tercatat pada tanggal 30 maret 2015 pembangunan apartemen Majestic Grand Bale. Yang kedua, PT Mahardika Daya Inti pada tanggal 2 November 2016 memasukan surat permohonan izin kedua yang mana ditujukan untuk pembangunan apartemen dengan nama Puri Notoprojo Apartmen. Kemudian yang ketiga, surat permohonan izin kembali masuk untuk yang ketiga kalinya masuk pada 2 juni 2017 namun dengan pengembang yang berbeda yaitu PT. Abyudaya Tata Anugrah Mandiri yang mana juga ditujukan untuk pembangunan apartemen yang sama yaitu Puri Notoprojo Apartmen(<https://tirto.id/warga-yogya-menolak-pembangunan-apartemen-csjG>).

Ketiga surat permohonan izin tersebut sudah dibalas oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, tetapi sampai sekarang ketiga pihak pengembang tersebut belum juga mengurus administrasi terkait pengurusan surat untuk izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pihak pengembang yang mana disini adalah PT. Abyudaya Tata Anugrah Mandiri mengaku bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan sosialisasi terkait pembangunan apartemen tersebut di dusun Balirejo. Namun pihak warga Balirejo menolak untuk datang karena pihak warga menolak keras terkait pembangunan apartemen tersebut.

Kemudian aksi dilakukan warga karena warga risih dengan kabar pembangunan apartemen tersebut. Dari keterangan Dono Susilo “kami khawatir

sumur kami dabitnya bisa berkurang”. Tulisan penolakan dalam suatu benner, dan aksi warga Balirejo geruduk kantor Sat Pol PP untuk mengklarifikasi rencana pembangunan aparemen di kawasan itu. Lihat Gambar 1 dan 2(jogja.tribunnews.com/2017/05/03/tolak-apartemen-warga-balirejo-geruduk-sat-pol-pp-kota-yogya).



Gambar 1: Spanduk Penolakan Warga



Gambar 2: Aksi Warga Geruduk Sat Pol PP

Dari hasil aksi yang dilakukan warga Dusun Balirejo ternyata mampu untuk menghalangi proses lanjutan dari pembangunan. Fenomena modernisasi sangat cepat dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta, khususnya Kota Yogyakarta yang sedang gencar-gencarnya melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur. Harapan dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, dengan adanya pembangunan akan memberikan imbas positif terhadap masyarakat sekitarnya. Tetapi penolakan yang dilakukan warga Dusun Balirejo merupakan pilihan yang berbeda. Gerakan sosial yang dibangun adalah atas kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian daerah dan warisan leluhur untuk masa depan.

Belakangan ini yang banyak menjadi fokus adalah gerakan masyarakat bawah (*grassroot*). Melihat dari kasus dan masalah yang terjadi di Kota Yogyakarta, khususnya di Dusun Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,

sebenarnya dapat dilihat dari akar permasalahannya yaitu perizinan. Bagaimana proses perizinan tersebut dapat memperlancar atau justru malah menghambat pembangunan.

Berdasarkan dengan tulisan dan penjelasan yang telah ada, maka keinginan untuk penulis melakukan kegiatan penelitian mengenai **“GERAKAN PERLAWANAN MENOLAK PEMBANGUNAN APARTEMEN” (Studi Kasus di Dusun Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta)**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan dari latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana dinamika perlawanan masyarakat dalam Menolak Pembangunan Apartemen di Dusun Balirejo, Kota Yogyakarta.?

3. Literatur Review

Penelitian pertama Fathor Rosid (2014) yang melakukan penelitian Gerakan Sosial di Desa Mulyorejo Kab. Jember. Dengan tema peran intelektual dalam gerakan sosial. Di dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana gerakan sosial yang terjadi, dan melihat bagaimana peran dari orang yang memiliki ilmu atau intelektual dalam memperjuangkan pelayanan listrik di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Teori dari Antoni Gramsci mengenai gerakan intelektual organik menjadi tujuan untuk memahami peran dari intelektual mengatur masyarakat. Beberapa bentuk perlawanan muncul seperti gerakan untuk memperjuangkan program listrik pedesaan dari PLN Jawa Timur. Gerakan dengan pendekatan ketokohan ternyata dimanfaatkan untuk mendapatkan untung pribadi.

Penelitian Kedua dilihat dari skripsi Galih Satria P (2017) yang melakukan penelitian gerakan Masyarakat di daerah Rembang, dengan tema penelitian Masyarakat menolak karena aka nada pembangunan pabrik semen. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktif untuk menjelaskan bahwa dinamika perlawanan yang dilakukan masyarakat sangat kompleks, gerakan perlawanan sosial ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang masing-masing memiliki ciri perlawanan dan dinamikanya sendiri. *Pertama*, Tahapan Pra Kondisi, dalam tahapan ini munculnya isu pembangunan pabrik semen pada tahun 2011-2012. Namun warga baru menyadari pada 16 Juni 2014 pada saat dilakukan peletakan batu pertama. Karena warga merasa tidak pernah diajak bicara, juga tidak adanya sosialisasi. Pada tahapan ini warga melakukan perlawanan dengan cara mendirikan tenda di area pembangunan pabrik. *Kedua*, Tahapan jalur hukum, warga melakukan perlawanan hukum kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar pranowo sebagai pihak yang mengeluarkan izin pembangunan pabrik P.T. Semen Indonesia dikawasan pegunungan kendeng. Perlawanan hukum yang dilakukan adalah sebagai respon terhadap pernyataan Ganjar yang menantang warga untuk menggugat keputusannya melalui jalur hukum. Pada saat perlawanan hukum warga dilakukan, terjadi bentrok sporadic di lokasi dan rangkaian demonstrasi dilakukan warga Rembang, Semarang, dan Jakarta. *Ketiga*, Tahapan Pasca Keputusan MA memenangkan warga yang mengharuskan Gubernur Jawa Tengah mencabut izin pendirian pabrik. Namun gubernur malah menerbitkan izin baru pembangunan pabrik. Perlawanan warga menjadi semakin radikal dengan rangkaian demonstrasi yang dilakukan di halaman DPRD dan Gubernur Jawa Tengah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Andhi Mahligai (2007) dengan judul (Gerakan Penolakan Pembangunan Pasar Induk Keputran Baru Oleh Warga Kebraon Surabaya). Dalam penelitian ini menjelaskan masyarakat menolak kebijakan negara yang bekerja sama dengan swasta, kekecewaan dan frustrasi dari masyarakat yang dilandasi keberadaan pasar akan mengganggu kenyamanan wilayah dan alasan ekonomi. Gerakan penolakan masyarakat dilakukan dengan dua metode, yang *Pertama* adalah metode *violent action* dengan menggunakan pengarahannya massa pada saat aksi pemblokiran jalan, dan demonstrasi pemblokiran jalan. Kemudian yang *Kedua* dengan metode *non violent action*, masyarakat berusaha dengan menggunakan jalur diplomasi dengan bantuan orang kedua untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Penelitian Keempat dilakukan oleh Citra Dewi (2015) yang melakukan penelitian gerakan sosial di daerah Kec. Sukoilo, Jawa Tengah, dengan tema melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa gerakan sosial. Dalam penelitian ini menjelaskan dengan keinginan yang kuat dari masyarakat untuk menolak pembangunan pabrik semen maka mendapatkan hasil yang baik. Keinginan masyarakat Sukoilo untuk menjaga sumber air, lahan pertanian, ekologi pegunungan karst, kebijakan yang semenah-menah, dan dampak sosial menjadi landasan utama keberhasilan gerakan yang dilakukan. Keterlibatan dari berbagai pihak seperti akademisi, ormas, dan pihak lain memnuat proses gerakan menjadi terkodiner. Ditambah dengan proses pembangunan kesadaran dari masyarakat sekitar untuk menjaga alam. Kemudian perjuangan dilanjutkan dengan melakukan demo, lobi, advokasi dan keberhasilan dari gerakan setelah pihak pengembang mengajukan peninjauan kembali dan ditolak.

Penelitian Kelima skripsi Indra Sanjaya (2017) tentang “Gerakan Anti Tambang Lumajang (Studi Kasus: Repertoar Perlawanan Laskar Hijau Terhadap Pertambangan pasir Besi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)”. Penelitian berfokus pada gerakan Laskar Hijau sebagai organisasi lingkungan. Beberapa bentuk perlawanan Laskar Hijau dan masyarakat Wotgalih adalah *pertama*, bentuk perlawanan yang dilakukan melalui dialog dengan pemerintah, kemudia terjadi perubahan dikarenakan tujuan yang diharapkan tidak tercapai. *Kedua*, demonstrasi masa menjadi bentuk perlawanan selanjutnya yang dilatarbelakangi oleh adanya kriminalisasi dan penganiayaan terhadap warga anti-tambang. *Ketiga*, penanaman sebagai bentuk aksi damai dan penegasan bahwa Laskar hijau dan masyarakat Wotgalih tetap menolak pertambangan di desanya.

Dalam penelitian terdahulu peneliti dapat melihat dan mempelajari berbagai bentuk gerakan. Penelitian yang telah dilakukan hampir sama yaitu tentang gerakan sosial akan tetapi berbeda dalam hal teori yang digunakan dan lokasi studi kasus yang diteliti.

Penelitian Keenam skripsi Danang Pamungkas (2017) tentang “ Perizinan Pendirian Apartemen di Kabupaten Sleman”. Penelitian yang dilakukan saudara Danang berfokus kepada bagaimana proses perizinan dan proses penyelesaian permasalahan dalam pembangunan apartemen di Kabupaten Sleman. Penelitian menggunakan model penelitian empiris yaitu penelitian hukum dengan mengkaji pelaksanaan undang-undang. Dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait yaitu Kepala Seksi Data dan Informasi Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan terkait perizinan pembangunan apartemen di Kabupaten Sleman. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa disetiap proses pembangunan apartemen

tidak selamanya berjalan mulus, melihat dari beberapa kasus yang terjadi di kabupaten sleman, banyak warga yang melakukan aksi protes terhadap apartemen yang sudah berdiri maupun yang akan dibangun. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai fokus kajian, penelitian dari saudara Danang lebih mengarah ke aspek hukum dan bagaimana proses yang seharusnya dilakukan ketika terjadi perlawanan dari masyarakat sekitar Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kepada bagaimana dinamika perlawanan dalam menolak pembangunan apartemen.

Penelitian Ketujuh Tesis Yanuar Tri Ifada (2017) tentang “Tinjauan Tentang Perizinan Pembangunan Apartemen (Studi Kasus Pembangunan Apartemen Utara The Icon Oleh PT. Bukit Alam Permata). Penelitian yang dilakukan Yanuar berfokus kepada mengkaji dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pembangunan apartemen Utara dengan menggunakan peraturan undang-undang yang berlaku dan peran dari Notaris-PPAT yang terkait dengan pelaksanaan perizinan pembanguana apartemen. Penelitian menggunakan model perpaduan antara penelitian yuridis empiris dengan yuridis normatif. Permasalahan yang terjadi adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Bukit Alam Permata mengenai tahapan pengurusan perizinan ke pemerintah setempat, munculnya ketidakcocokan pada proses pengajuan syarat permohonan SK-IPT dan munculnya masalah ketidaksesuaian AMDAL, kemudian ditambah dengan ketidakcocokan dokumen RTB. Perbedaan penelitian dengan yang dilakukan peneliti adalah fokus kajian, penelitian dari Yanuar lebih berfokus kepada aspek hukum terkait prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kearah gerakan perlawanan terhadap pembangun Apartemen.

Penelitian Kedelapan skripsi Ahmad Fadli Azami (2015) dengan judul Konflik Pembangunan Apartemen di Perkotaan Jogja, dengan fokus studi kasus Konflik Apartemen Utara the icon di Karangwuni. Penelitian yang dilakukan saudara Ahmad menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian untuk menelusuri akar permasalahan sehingga terjadi konflik antara warga RT 01/RW 01 dengan PT. Bukit Alam Permata, dan mendeskripsikan dinamika dan proses perkembangan konflik yang terjadi. Perbedaan penelitian yang terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang dilakukan saudara Ahmad di Daerah Karangwuni, Kabupaten Sleman dengan nama Apartemen Utara the Icon, sedangkan yang dilakukan peneliti berada di Daerah Dusun Balirejo, Kota Yogyakarta dengan nama Apartemen Puri Notoprojo.

Penelitian Kesembilan skripsi Fahmi Huda (2017) dengan judul penelitian “Konflik Air Antara Warga dan Hotel Fave di Kampung Miliran. Penelitian yang dilakukan saudara Fahmi menggunakan metode deskriptif dan analisis data kualitatif, dengan fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya konflik dan bagaimana upaya yang ditempuh warga iliran dan pihak Hotel untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan yang terjadi adalah ketika memuncaknya konflik dengan wujud aksi demo yang dilakukan oleh warga dan aksi mandi pasir, kemudian ditambah dengan penyegelan pintu belakang hotel. Penyelesaian masalah ditempuh dengan penutupan sumur dalam milik hotel Fave oleh warga, dan pihak hotel memilih untuk menampung dan berlangganan air PDAM. Perbedaan yang ada antara penelitian yang dilakukan saudara Fahmi dan peneliti adalah aksi yang dilakukan warga setelah mendapat akibat dari adanya pembangunan hotel Fave,

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah aksi penolakan yang dilakukan warga sebelum apartemen Puri Notoprojo mulai di bangun.

Penelitian Kesepuluh Tesis M. Adityawarman (2017) dengan judul penelitian Modal Sosial dan Gerakan Masyarakat, yang melakukan penelitian di daerah Dusu Gadingan dan Karangwuni Kabupaten Sleman. Penelitian yang dilakukan saudara Adityawarman menggunakan teori modal social dari Robert D Putnam dan konsep gerakan sosia baru dari Singh. Fokus penelitian untuk melihat peran modal sosial dalam memfasilitasi tindakan bersama yang dilakukan warga dalam menolak pembangunan Apartemen. Hasil penelitian yang ditemukan adalah warga melakukan gerakan social dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki. Diantara dengan melakukan pengumppulan dana bersama, pemasangan spanduk, dan pembentukan paguyuban dengan fokus untuk membangun relasi dengan kelompok yang memperhatikan isu yang dibawa. Perbedaan penelitian yang dilakukan saudara Adityawarman dengan peneliti adalah penggunaan teori yang ada dan lokasi penelitian yang berbeda Daerah.

4. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori atau konsep yang dilakukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau sering dikatakan bahwa kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini defenisi mengenai teori, menurut Emory Cooper (dalam Umar, 2004:50), dalam pemikiran dan temuan yang didapat mengenai teori, Cooper menjelaskan bahwa teori adalah suatu kumpulan konsep, defenisi, proposisi, dan variable yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat

menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena tertentu. Adapun kerangka dasar teori dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Gerakan Sosial

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori gerakan sosial yang digagas oleh Sidney Tarrow (dalam Suharko 2006:5-7), setidaknya ada empat konsep dasar gerakan sosial yaitu:

1. Tantangan Kolektif

Keadaan untuk menghalangi kegiatan golongan lain merupakan suatu tanda dari tantangan kolektif. Dilihat dari proses perlawanan, tantangan kolektif biasa disimbolkan lewat slogan, corak pakaian dan musik. Keadaan untuk menentang secara bersama-sama merupakan bagian yang banyak dilihat dari suatu gerakan sosial. Dapat dimaknai demikian karena keadaan kurangnya sumber daya yang kokoh.

2. Tujuan Bersama

Keinginan untuk bersama dalam bergerak pastinya memiliki alasan tersendiri, apalagi bergerak dengan orang banyak. Gerakan sosial, kalau ingin mencari alasan kenapa orang ingin bersama untuk melakukan gerakan adalah untuk melawan atau menentang pihak lain, yang dirasa merugikan banyak pihak. Hal penting untuk menjaga tujuan bersama dengan melakukan komunikasi yang berguna untuk menyamakan perbedaan persepsi, kemudian sinergi

sebagai kekuatan, yaitu bagaimana mengembangkan perbedaan sebagai suatu kekuatan bersama untuk mencapai hasil yang baik.

3. Solidaritas dan Identitas Kolektif

Munculnya keinginan untuk bergerak bersama dalam gerakan sosial, merupakan suatu pandangan dari orang yang ikut berperan serta untuk mewujudkan kebutuhan bersama, yang awalnya hanya kemungkinan untuk bisa bergerak berubah menjadi pergerakan yang nyata. Menjaga Identitas kolektif menjadi hal mendasar dalam melakukan pergerakan, keadaan yang sama atau menyamakan diri dengan orang lain menjadi dasar dalam identitas kolektif yakni dengan Dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, adat, dan agama, menjadi poin pembeda yang harus dijaga.

4. Memelihara Politik Perlawanan

Gerakan bersama untuk melawan salah satu pihak berpotensi menjadi gerakan sosial. Memelihara politik perlawanan dalam kaitannya dengan gerakan sosial menjadi salah satu poin penting, tujuan yang diinginkan bersama harus dijaga agar arah gerakan tidak berubah menjadi suatu kebencian dan kemarahan yang dilepaskan tanpa memahami arah dari perlawanan. Untuk memelihara politik perlawanan dengan menggunakan sikap kritis dan waspada terhadap suguhan informasi, melakukan riset dengan sikap kritis agar tidak terlibat dalam propaganda yang akan merugikan diri atau kelompok.

Dengan demikian gerakan sosial perlu dibedakan dengan aksi-aksi kolektif. Setidaknya gerakan sosial memiliki empat properti dasar yang ditawarkan Sidney Tarrow diatas. Gerakan sosial juga dilakukan dengan penuh pertimbangan dalam pembentukannya dan orang-orang yang terlibat didalamnya.

Menurut Giddens (dalam Putra, 2006), mengemukakan gerakan sosial merupakan suatu jalan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Tarrow (1998) memberikan penjelasan yang berbeda dengan menjelaskan bahwa gerakan sosial ketika terjadi perkumpulan dari masyarakat untuk memperjuangkan hak dengan menentang elit, pemangku kekuasaan, dan pihak lain merupakan tindakan politik perlawanan .

Kornblum dalam (Sunarto, 2004:195) mengatakan gerakan yang berupaya mempertahankan nilai dan institusi masyarakat sebagai gerakan konservatif. Dalam perkembangan gerakan sosial, didapatkan beberapa temuan yang menyangkut keadaan seseorang untuk melakukan dan ikut terlibat dalam suatu gerakan. Faktor mendasar dan umumnya terjadi karena adanya kondisi yang sangat berat dialami oleh masyarakat, seperti susahnya untuk bertahan hidup karena kesempatan untuk memenuhi kebutuhan seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang hilang. Keberhasilan suatu gerakan sosial bergantung pada faktor manusia seperti kepemimpinan, organisasi, dan keterlibatan, serta faktor sumber daya lain seperti dana dan sarana.

Pengaruh besar dari sebuah gerakan sosial untuk perubahan sosial, ternyata mampu menjadi pertimbangan besar untuk membuat dan mengambil keputusan. Perkembangan gerakan sosial kalau melihat fakta dilapangan, langkah dan gerakannya yang digunakan oleh individu, organisasi, dan para pemimpin yang menghasilkan pendapat juga dapat disebut sebagai bagian dari gerakan sosial.

Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan dan hasilnya adalah gerakan sosial. Lahirnya gerakan sosial dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan terhadap masyarakat. Dalam artian, ketika muncul tujuan dan kepentingan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka disitulah suatu gerakan akan lahir. Reaksi gerakan sosial yang muncul, karena kebijakan yang dibuat tidak adil.

Dalam perkembangan masyarakat, gerakan sosial dijelaskan sebagai suatu bentuk perilaku bersama yang pasti. Temuan dari beberapa ahli sosiologi memberikan tekanan bahwa gerakan sosial dijelaskan sebagai segi kesenjangan, organisasi dan kesinambungan. Umur gerakan sosial dan perkembangan peradaban manusia tentu sama tuanyan. Gerakan sosial menjadi suatu keadaan nyata yang menarik untuk dikaji secara lebih luas, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang luas mengenai keadaan masyarakat disekitar. Perkembangan dan strategi gerakan sosial memiliki arah dan tempat tersendiri disetiap keadaan, dengan proses yang dapat di analisa dari setiap gerakan yang ada.

Sebutan perilaku kolektif atau perilaku bersama yang sering digunakan, dari temuan dan pandangan ahli sosiologi menjelaskan bahwa adanya kumpulan orang yang berani tampil secara spontan tanpa direncanakan merupakan tanggapan dari suatu kejadian tertentu. Perilaku bersama merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh, karena memiliki muatan dan tujuan untuk menghapus ketidakpuasan dan kecemasan. Menurut Milgran dan Touch (dalam Razak, 2008), Dalam temuannya mengenai perilaku kolektif, adalah ketika adanya tanggapan yang muncul dengan sendirinya tanpa diduga dan proses kelanjutan dari reaksinya bergantung kepada dorongan timbal balik yang ada.

Kemudian muncul Teori gerakan sosial baru sebagai respon terhadap teori gerakan sosial lama Gerakan Sosial Baru (GSB) adalah gerakan yang lebih fokus kepada isu-isu budaya dan identitas. Mengutip pendapat Rajendra Singh dalam buku yang berjudul “Gerakan Sosial : Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial”, menyatakan beberapa karakteristik umum dalam GSB, antara lain (Suharko,2006:65-68):

1. GSB menaruh konsep kepada masyarakat sipil, dimana keadaan dan kemampuan Negara untuk mengendalikan masyarakat dengan perlahan menutup ruang sosial masyarakat. GSB menyerukan suatu kondisi keadilan dan bermartabat untuk masyarakat agar kreatif dan berseiring dengan alam.
2. Secara keras GSB mengubah metode paradigma mengenai konflik kelas yang dijelaskan oleh marxis. Dalam pandangan marxisme, menjelaskan bahwa model dan bentuk dari perjuangan sebagai

suatu perjuangan kelas. Kemudian bentuk dari pengelompokan menurut marxisme merupakan kelompok kelas. Dari dua hal diatas yang membuat gerakan sosial baru menjawab, karena banyak kelompok atau gerakan seperti feminisme dan anti radikalisme dalam pandangan marxisme tidak termasuk dalam perjuangan kelas. GSB mencari jawaban atas paradigma kelas dan ketidakmampuan penjelasan Marxis untuk menjawab tantangan gerakan baru.

3. Aksi bersama tidak melihat dari latar belakang suatu kelas, dalam Gerakan Sosial Baru organisasi atau kelompok tidak menjadikan acuan untuk bergerak. Fokus dari GSB adalah untuk memberikan respon terhadap masalah masyarakat dengan niat untuk tetap menjaga jati diri masyarakat sipil.
4. Mempunyai perbedaan dengan gerakan sosial klasik, GSB memiliki cita-cita dan orientasi yang lebih luas. Gerakan sosial baru memberikan arah aksi dan kepentingan yang lebih banyak.

Menurut Nash (dalam Suharko,2006) menyatakan GSB lebih berpusat pada tujuan nonmaterial dan menekankan pada perubahan-perubahan dalam gaya hidup dan kebudayaan dari pada mendorong perubahan-perubahan spesifik dalam kebijakan publik atau perubahan ekonomi. Secara jelas, bahwa gerakan yang mengangkat isu tentang lingkungan, anti-perang, perdamaian, dan feminisme dimasukkan dalam kategori GSB. Dilihat dari segi motivasi dan visinya sudah dapat dibedakan antara gerakan sosial era lama dan gerakan sosial baru.

Menurut (Hussey, 2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Political Action Versus Personal Action: Understanding Social Movements' Pursuit of Change Through Nongovernmental Channel* menyatakan bahwa gerakan sosial baru memiliki beberapa indikator antara lain, Ideologi dan Tujuan, Taktik dan Pengorganisasian, Partisipan dan Aktor, Medan dan Area.

1. Ideologi dan Tujuan

Menitikberatkan pandangan pada perubahan identitas dan gaya hidup dengan proses mendukung tujuan dari gerakan sosial baru.

2. Taktik dan Pengorganisasian

Mengembangkan penemuan hal-hal yang baru untuk memberikan pengaruh terhadap pendapat sebagian besar rakyat, mengerahkan orang dalam hal ini masyarakat sebagai pendapat umum untuk mendapat daya tawar politik.

3. Partisipan dan Aktor

Partisipan yang bergerak berasal dari berbagai basis sosial tanpa melihat gender, pendidikan, dan kelas. Kemudian aktor yang terlibat sangat luas dari kaum intelektual kemudian kelas menengah bahkan akademisi dan mahasiswa.

4. Medan dan Area

Medan dan area sangat luas baik dari lokal sampai internasional. Dari sini dapat dilihat bahwa fokus dari gerakan sosial baru adalah mengangkat isu sosial-kultural.

B. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan menurut Surbakti (1992:109), memiliki pengertian sebagai organisasi yang dibentuk oleh sejumlah orang karena adanya kesamaan sikap dan tujuan. Teori ini menjelaskan bagaimana cara yang digunakan gerakan dalam mengartikulasikan kepentingannya. Dalam menjalankan tindakan kepentingannya kelompok kepentingan akan berupaya untuk mencari bentuk jalan yang efektif dan bersifat khusus sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal bagi kelompok kepentingan sebagai tujuan utama dari tuntutanannya.

Menurut Almond (dalam Surbakti, 1984:101-104) terdapat empat jalan penting bagi suatu kelompok kepentingan untuk mengajukan kepentingannya, yaitu: melalui demonstrasi, hura-hura, dan sebagainya; melalui para elite yang mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan eksekutif ataupun para elite yang bersimpati kepada mereka; melalui jalan formal dengan menggunakan lembaga-lembaga seperti media, ataupun lembaga pemerintah lainnya. Almond melanjutkan penemuannya dijelaskan(dalam Surbakti, 1984:105), terdapat empat macam penyusunan pengajuan kepentingan seperti :

- a.* Mempunyai sifat keterbukaan dan jelas dalam menjelaskan maksud tujuannya, atau mempunyai sifat yang tersembunyi.
- b.* Mempunyai sifat khusus yang sangat jelas dalam menguraikan maksud tujuannya, atau samar-samar dan tidak jelas maksud dari keinginannya.

- c. Mempunyai sifat menyeluruh dalam hal ini kepentingan umum bagi masyarakat atau kelompok, atau pribadi dari suatu masyarakat maupun kelompok lain.
- d. Mempunyai harapan untuk mendapatkan solusi, atau hanya keinginan dari kedua pihak yang bernegosiasi dengan pertimbangan keuntungan dan kerugian untuk kedua pihak.

Kelompok kepentingan menurut Gaffar(1999:204), dalam suatu urusan Negara memiliki empat peran penting seperti:

1. Mempercepat terjadinya perubahan, yaitu berusaha membela dan menyadarkan masyarakat untuk bersama-sama menghadapi setiap masalah dan setiap kepentingan yang merugikan.
2. Memantau dan mengawasi pemerintah.
3. Memberikan sarana guna memudahkan perbaikan Negara melalui lembaga peradilan.
4. Membantu tujuan perkembangan masyarakat.

Selanjutnya, menurut penemuan dari Gabriel Almond dalam (Satriawan, 2018:3) ada empat model atau tipe dari kelompok kepentingan yaitu:

1. *Kelompok Kepentingan Institutional*, merupakan sebuah kelompok yang memiliki visi dan misi dan memiliki tugas serta fungsi sebagai bagian dari kepentingan. yang biasanya merupakan bagian dari beberapa elit politik, seperti para ulama, anggota parlemen, tentara, dan berbagai elit politik lainnya.

2. *Kelompok Kepentingan Asosiasi*, merupakan kelompok yang terbentuk dari suatu gabungan antara kelompok dan masyarakat, yang merupakan gabungan dari kelompok tertentu, seperti perhimpunan petani dan beberapa perserikatan petani.
3. *Kelompok Kepentingan Non-Asosiasi*, merupakan kelompok yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat awam dan tidak terorganisir oleh kepentingan tertentu, kelompok yang biasanya terdiri dari kelompok suku, etnis, agama dan lain-lain.
4. *Kelompok Kepentingan Anomik*, yaitu kelompok yang terbentuk diantara unsur dalam masyarakat secara spontan, dan bersifat tak terduga dalam beberapa kejadian, misalnya kelompok demonstrasi.

Selanjutnya menurut Rachman (2007) ada empat tujuan didirikannya kelompok kepentingan yaitu:

- a. Untuk melindungi kepentingannya dari adanya dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah atau Negara.
- b. Untuk menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat dalam kehidupannya.
- c. Untuk menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap tugas dan fungsi pemerintah dan Negara.
- d. Untuk menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam semua bidang kehidupan.

Melihat teori yang ada diatas dapat dikaitkan bahwa kelompok kepentingan dan gerakan memiliki pengaruh dengan tujuan untuk mempengaruhi dari setiap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat atau yang sedang berjalan. Dalam

berjalannya sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia, kelompok kepentingan menjadi sebuah penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

5. Defenisi Konseptual

A. Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah aksi bersama yang memiliki sifat berkelanjutan yang bertujuan untuk menghambat atau mendorong suatu perubahan dalam masyarakat.

B. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan suatu kelompok yang terorganisir dan memiliki pengaruh serta memiliki tujuan secara kolektif untuk memberikan pengaruh dari setiap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat atau yang sedang berjalan dari sebuah Negara atau pemerintah.

6. Defenisi Operasional

Untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai gerakan yang dilakukan oleh masyarakat balirejo, maka peneliti memakai beberapa indikator sebagai berikut:

A. Masyarakat Balirejo Sebagai Gerakan Sosial

1. Memiliki tantangan kolektif
2. Memiliki tujuan bersama
3. Memiliki solidaritas dan identitas kolektif
4. Memelihara Politik Perlawanan

B. Perlawanan Masyarakat Balirejo Terhadap Pembangunan Apartemen

1. Alasan Penolakan Terhadap Apartemen
2. Bentuk-bentuk Perlawanan Masyarakat Balirejo
3. Dampak Perlawanan Masyarakat Balirejo

C. Mobilisasi Gerakan Perlawanan Warga Balirejo

D. Dinamika Gerakan Perlawanan Masyarakat Balirejo

7. Metodologi Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Peneliti kualitatif memiliki hubungan dengan ide, persepsi, pendapat, dan kepercayaan dari orang yang diteliti yang semuanya itu tidak dapat diuji dengan angka(Sulistyo-Basuki, 2006:78).

Penggunaan metode penelitian kualitatif yang digunakan setelah melihat dan memutuskan dengan beberapa alasan, metode ini mampu untuk menyesuaikan keadaan yang ada di lapangan dan memberikan kebebasan kepada peneliti untuk langsung berhubungan dengan responden yang ada di lapangan.

Penelitian ini akan menggunakan teknik Snowbal sebagai pengambilan data yang menurut (Sugiyono, 2014:54), yaitu teknik pengambilan data yang pada awalnya jumlah informan sedikit, lama

kelamaan akan menjadi banyak. Teknik ini akan memberikan arah kepada karakteristik tertentu yaitu masyarakat Balirejo yang terlibat dalam penolakan, dan beberapa informan yang dirasa dapat membantu untuk memberikan informasi yang valid terkait fokus penelitian. Yaitu gerakan perlawanan menolak pembangunan apartemen.

B. Unit Analisis

Menurut temuan dari Suprayogo dan Tobroni (2001: 48), unit analisa merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pusat atau bagian dari penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, benda, dan organisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Sesuai dengan pembahasan yang menjadi judul dalam penelitian ini maka unit analisisnya adalah masyarakat Balirejo dan pihak instansi yang terkait.

C. Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh dengan melihat langsung objek yang akan diteliti melalui proses berupa wawancara dan hasil pengamatan langsung dilapangan. Sumber data utama ini diperoleh dari Gerakan Masyarakat Balirejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikutip oleh sumber lain melalui jurnal, buku, internet dan berbagai macam media yang dapat digunakan dalam perolehan data. Data tersebut digunakan untuk koheransi data primer yang kurang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang melalui penerapan kualitatif yang berisi kutipan kata-kata untuk memberi gambaran tentang penelitian lapangan. Dalam penelitian ini cara yang efektif digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Easberg dalam (Sugiyono, 2014) wawancara atau interview adalah “wawancara adalah dua orang yang bertemu untuk bertukar informasi dan ide dengan melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu”. Kelebihan dari metode wawancara adalah kesempatan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber yang utama, kemudian dari pertanyaan yang diberikan dapat berkembang lebih jauh dengan berbagai penjelasan dari narasumber. Kekurangan dari metode ini adalah keterbatasan dalam mengumpulkan data dan informasi, kemudian dapat memakan waktu dan biaya yang cukup besar, jika wawancara dilakukan di suatu wilayah yang luas.

Metode wawancara yang dilakukan berguna untuk menggali secara lebih dalam informasi terkait fokus penelitian, bagaimana

dinamika perlawanan masyarakat Balirejo dalam melakukan perlawanan terhadap rencana pembangunan Apartemen. Adapun yang menjadi informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam aksi perlawanan dan dinas terkait, yakni Ketua RW 05, Ketua RW 06, Ketua RT 49, 52, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

b. Observasi

Menurut (Supardi, 2006:88) metode observasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara melihat dan memperhatikan dengan teliti serta mencatat keadaan dan peristiwa yang diteliti. Dalam penelitian ini hasil dari observasi yang dilakukan untuk mengemukakan gambaran nyata perilaku atau kejadian yang terjadi untuk menjawab pertanyaan, mengerti tanggapan dari masyarakat, dan melakukan penilaian.

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung melihat ke daerah penelitian seperti mengamati lokasi yang akan dijadikan bangunan Apartemen dan melihat kegiatan serta kondisi masyarakat yang tinggal di daerah Balirejo.

c. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2014:329) dokumentasi merupakan catatan dari suatu peristiwa yang sudah berlalu. Bentuk dari dokumen seperti tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dan kebijakan. Kemudian dokumen berbentuk gambar

misalnya gambar hidup, foto, sketsa dan lain-lain. Kemudian dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Kelebihan dari metode dokumentasi adalah kesempatan untuk memperoleh teks asli dan lengkap, dapat memberikan informasi dan mudah untuk diakses, dan kemudian dari waktu dan tenaga yang digunakan. Kemudian kurang dari metode dokumentasi yaitu perlunya pengujian yang mendalam dari setiap dokumen, karena tidak semua dokumen dapat dipercaya. Sebagai contoh dari banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena ada kepentingan tertentu dibalik foto yang dibuat.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data merupakan rangkaian untuk mencari dan menyusun secara teratur dari data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara menyusun data memilih yang penting dan perlu dipelajari kemudian membuat kesimpulan untuk dapat mudah memahami (Sugiyono, 2014:244). Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif sebagaimana temuan dari Miles dan Hubberman dalam (Sugiyono, 2014:246-253) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berikut langkah-langkahnya.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan perubahan melalui pemilihan, pemfokusan dari data yang mentah langsung dari lapangan diolah menjadi informasi yang bermakna, sehingga mudah dalam penarikan kesimpulan. Proses reduksi data terus dilakukan dan berkesinambungan dengan pengumpulan data. Selama proses pengumpulan data maka tahapan reduksi data terjadi dengan membuat ringkasan atau catatan penting yang terus dilakukan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian data

Penyajian data juga menjadi bahan pertimbangan dan arah selanjutnya untuk langkah-langkah yang harus dilakukan dengan memahami setiap penyajian yang diterangkan. Penyajian data yang sering digunakan dalam data kualitatif adalah dalam bentuk menguraikan. Dengan menyajikan data berupa kumpulan informasi yang telah tersusun secara teratur dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data, melihat hasil reduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah secara tujuan yang ingin dicapai. Data yang telah terkumpul dan tersusun kemudian dilakukan proses perbandingan antara satu dengan yang lain untuk dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

8. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Dusun Balirejo, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Latar belakang masalah, gerakan perlawanan yang dilakukan oleh warga Dusun Balirejo terjadi akibat adanya rencana pembangunan apartemen.

9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa bab. Untuk bab *Pertama*, memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, literature review, kerangka teori, defenisi konseptual, defenisi operasional, metodologi penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab *kedua*, berisi tentang politik lokal dan sejarah perlawanan di Yogyakarta, dan bab *ketiga*, menjelaskan mengenai masyarakat balirejo sebagai Gerakan sosial dan perlawanan masyarakat Balirejo dalam menolak pembangunan apartemen di Dusun Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dan terakhir bab *keempat*, kesimpulan dan saran.